

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Pergerakan nasional merupakan salah satu momentum yang penting bagi sejarah bangsa Indonesia. Dikatakan demikian karena pada masa pergerakan nasional, perjuangan menentang praktik-praktik kolonialisme dan imperialisme Belanda tidak lagi dilakukan melalui perjuangan fisik dan bersenjata, melainkan melalui organisasi-organisasi pergerakan kebangsaan yang bersifat modern. Organisasi-organisasi pergerakan tersebut bergerak dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Hal tersebut menandakan bahwa pergerakan nasional bersifat multidimensional yang berarti meliputi segala bidang yaitu bidang sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Pringgodigdo (1986, hlm. VIII) bahwa pergerakan nasional memiliki arti yang luas dan besarnya aspek yang meliputinya, tidak hanya berupa pergerakan yang bersifat perbaikan derajat dari aspek politik, akan tetapi juga menuju perbaikan aspek-aspek lain seperti perekonomian, kebudayaan, keagamaan, pendidikan, dan sebagainya.

Berdasarkan sifat gerakannya, pergerakan nasional dapat diklasifikasikan ke dalam dua gerakan yaitu gerakan kooperatif dan gerakan non kooperatif. Tirtoprodjo (1965, hlm. 20) mengungkapkan bahwa pada dasarnya tujuan kedua gerakan tersebut baik yang kooperatif maupun non kooperatif sama-sama memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia, yang berbeda hanyalah cara dan taktik perjuangannya. Gerakan dengan cara kooperatif dalam perjuangannya bekerjasama dengan Pemerintah Hindia Belanda dengan ikut masuk ke dalam sistem pemerintahan kolonial dan ikut duduk di dalam kursi badan-badan perwakilan. Sedangkan gerakan dengan cara non kooperatif dalam perjuangannya menolak masuk ke dalam sistem pemerintahan kolonial. Paparan tersebut senada dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Ruchiat dkk dalam bukunya yang berjudul *Sepak Terjang Perjuangan Politik Mohammad Hoesni Thamrin* yaitu:

Golongan non kooperator adalah golongan yang tidak mau bekerja sama dengan Pemerintah Hindia Belanda. Mereka lebih memilih terjun langsung

ke masyarakat dan menolak menjadi anggota *Volksraad* atau dewan-dewan lain bentukan pemerintah kolonial. Sebaliknya kaum kooperator tidak menolak dan bersedia bekerjasama dengan Pemerintah Hindia Belanda. Mereka bersedia menjadi anggota *Volksraad*, Dewan Propinsi, Dewan Kabupaten dan Dewan Kotapraja (Ruchiat, dkk. 2010, hlm. 106).

Tokoh-tokoh yang berjuang dengan cara kooperatif di antaranya adalah Soetardjo Kartohadikoesoemo, Soetomo dan Mohammad Husni Thamrin. Sedangkan tokoh-tokoh yang berjuang dengan cara non kooperatif di antaranya adalah Soekarno, Mohammad Hatta, Sutan Sjahrir dan Tan Malaka. Meskipun melalui cara dan taktik perjuangan yang berbeda, akan tetapi perjuangan para tokoh-tokoh tersebut baik yang melalui cara kooperatif ataupun non kooperatif sama-sama mempunyai peranan penting dan saling melengkapi satu dengan yang lain.

Perjuangan dalam mencapai kemerdekaan baik yang melalui gerakan kooperatif maupun non kooperatif sama-sama memiliki konsekuensi masing-masing. Kelompok yang memilih jalan non kooperatif kerap kali pergerakan mereka dipatahkan oleh Pemerintah Hindia Belanda dengan berbagai cara. Berbeda dengan kelompok yang memilih jalan kooperatif, kerap kali mereka mendapat konotasi negatif. Dengan berjuang di dalam sistem pemerintahan kolonial, mereka seringkali dianggap sebagai kaki tangan Belanda. Kecurigaan tersebut tidak sepenuhnya salah, terdapat beberapa di antara mereka yang setia dan patuh kepada Pemerintah Hindia Belanda dengan sikap lebih Belanda daripada Belanda (Ruchiat, dkk. 2012, hlm 7). Namun tidak semua demikian, banyak juga tokoh-tokoh kooperatif yang berpihak kepada rakyat Indonesia. Mereka berjuang meningkatkan taraf hidup rakyat Indonesia dan memperjuangkan kemerdekaan bangsa. Mohammad Husni Thamrin adalah salah satunya. Dengan bergerak di dalam sistem pemerintahan kolonial sebagai anggota badan perwakilan, Mohammad Husni Thamrin justru menjadi juru bicara bagi rakyat Indonesia yang dengan lantang menuntut kemerdekaan.

Sebagai bentuk penghargaan atas jasa-jasa yang diberikan oleh Mohammad Husni Thamrin terhadap bangsa ini, setelah sembilan belas tahun wafatnya Beliau pada tanggal 28 Juli 1960 melalui Keputusan Presiden No. 175

Tahun 1960, Pemerintah Republik Indonesia menetapkan sdr. Mohammad Husni Thamrin almarhum sebagai Pahlawan Kemerdekaan Nasional. Tidak hanya itu, nama Mohammad Husni Thamrin diabadikan sebagai salah satu nama jalan protokol di Jakarta yang terbentang kurang lebih 2 kilometer dari TPU Karet Bivak (Tim Museum M.H. Thamrin, 2008, hlm. 33). Nama Mohammad Husni Thamrin juga dijadikan sebagai nama proyek perbaikan kampung besar-besaran di Jakarta pada tahun 1970-an, nama rumah sakit, nama universitas dan untuk mengenang jasa-jasanya didirikan pula Museum M.H. Thamrin di Jalan Kenari II No. 15 Jakarta Pusat.

Sayangnya, dari sekian banyak penghargaan atas jasa-jasa Thamrin terhadap bangsa ini, masyarakat terutama generasi muda saat ini banyak yang tidak mengetahui bagaimana perjuangan yang dilakukan oleh Mohammad Husni Thamrin sehingga namanya banyak diabadikan. Dari penelitian mengenai sosok Mohammad Husni Thamrin yang dilakukan oleh Yasmine Zaki Shahab dan kawan-kawan pada tahun 2008 terhadap 427 siswa di 11 SMA yang tersebar di wilayah Propinsi DKI Jakarta menunjukkan bahwa sebagian besar siswa SMA di Jakarta yaitu 90,6 % pernah mendengar nama Mohammad Husni Thamrin. Namun, dari 90,6 % tersebut hanya 56,8 % siswa yang mengetahui Thamrin sebagai pejuang. Hanya sedikit yang mengetahui Thamrin sebagai pembela masyarakat miskin yaitu sebesar 4,6 %. Sedangkan sebagian yang lain yaitu sebesar 9,3 % mengetahui Thamrin hanya sebagai nama sebuah jalan di Jakarta (Tim Museum M.H. Thamrin, 2008, hlm. 53-55).

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa generasi muda di Jakarta umumnya pernah mengenal nama Mohammad Husni Thamrin. Meskipun begitu, hanya sebagian saja yang mengetahui peranan Thamrin di masa lampau. Padahal Thamrin merupakan pahlawan nasional yang lahir di Jakarta dan beretnis Betawi sehingga sudah selayaknya Mohammad Husni Thamrin dikenal oleh generasi penerus bangsa, khususnya oleh masyarakat di mana Thamrin berasal dan berjuang. Namun, kebanyakan dari mereka hanya pernah mengenal nama Mohammad Husni Thamrin tanpa mengetahui apa yang diperjuangkannya. Bahkan telah disebutkan di atas bahwa sebesar 9,3 % dari 427 siswa SMA di

Jakarta mengetahui Thamrin hanya sebagai nama sebuah jalan. Sangat memprihatinkan ketika generasi muda sebagai generasi penerus bangsa yang kelak akan meneruskan estafet kepemimpinan tidak mengetahui perjuangan pahlawan bangsanya.

Salah satu alasan kurangnya pengetahuan masyarakat Indonesia terhadap sosok Mohammad Husni Thamrin adalah karena cara dan taktik perjuangannya yang dilakukan secara kooperatif dengan Pemerintah Hindia Belanda. Masyarakat pada umumnya lebih mengetahui dan menghargai perjuangan melawan pemerintahan Kolonial Belanda dengan cara non kooperatif. Sehingga tokoh-tokoh pergerakan seperti Soekarno, Mohammad Hatta, Sutan Sjahrir juga tokoh-tokoh lainnya yang berjuang secara non kooperatif lebih diketahui perjuangannya oleh masyarakat daripada tokoh-tokoh yang berjuang dengan cara kooperatif. Hal tersebut terjadi karena adanya perhatian yang berlebihan kepada gerakan radikal dan gerakan non kooperatif yang menjunjung tinggi cita-cita Indonesia, sedangkan kelompok-kelompok yang memiliki ide-ide lain mengenai Hindia yang merdeka di masa depan dan dengan cara-cara lain untuk mencapai tujuan ini direndahkan atau diremehkan. Lebih lanjut Miert (2003, hlm. xxi-xxii) menjelaskan bahwa:

Pendekatan sepihak ini adalah buah dari pengamatan teleologis di masa lalu, yaitu bahwa kaum nasionalis nonkooperatif dan radikallah yang akhirnya berhasil mencapai kemerdekaan dan membangun Indonesia merdeka menurut ide-ide mereka. Seperti yang sering terjadi, pendapat yang berlaku adalah pendapat si pemenang. Tetapi pengertian yang bengkok dan berdimensi tunggal itu mengaburkan situasi kompleks Hindia sebelum perang. Waktu itu banyak tokoh ikut meramaikan pentas politik pribumi. Menyesatkan sekali kalau kita hanya menokohkan kaum nasionalis nonkooperatif dan menganggap tokoh-tokoh lainnya tidak lebih dari figuran belaka.

Perjuangan Mohammad Husni Thamrin pada masa pergerakan nasional dilakukan melalui badan-badan perwakilan bentukan pemerintah kolonial. Thamrin memulai karier politiknya sebagai anggota *Gemeenteraad* atau Dewan Kota Batavia pada tahun 1919 yang kemudian memperluas gerakan politiknya hingga menjangkau cakrawala nasional setelah ia menjadi anggota *Volksraad* atau Dewan Rakyat Hindia Belanda pada tahun 1927.

Gemeenteraad atau Dewan Kota merupakan salah satu struktur perwakilan pertama yang dibangun oleh birokrasi kolonial yang diilhami politik etis. Institusi yang dipilih secara sempit ini dibentuk sebagai bagian dari proses desentralisasi dan pelonggaran kontrol yang dimulai sejak akhir abad 19 dan menemukan momentumnya pada awal abad 20 (Hering, 2003, hlm. 58). *Gemeenteraad* yang dibentuk dengan tujuan untuk memajukan kepentingan daerah masing-masing ini dalam prakteknya menuai banyak kecaman dari para tokoh pergerakan. Hal tersebut disebabkan karena mayoritas yang duduk dalam Dewan Kota adalah orang Belanda dan Timur Asing terutama Cina, sedangkan orang Indonesia yang menjadi anggotanya hanyalah pegawai pemerintah. Sehingga dalam praktiknya, pemerintahan di Hindia Belanda masih tetap bersifat sentralistik (Ricklefs, 2009, hlm. 348). Hal tersebut senada dengan yang dikemukakan Sutherland (1978, hlm. 126) bahwa:

Dampak dewan-dewan terhadap penduduk pribumi hanya kecil saja; dewan-dewan ini lebih menyerupai badan pembantu kepada pemerintahan setempat daripada badan-badan politik perwakilan. Beberapa anggota dewan dari kalangan pribumi hampir selalu terdiri dari pegawai-pegawai tinggi pemerintah, yang cenderung untuk bisa dilihat tetapi tidak bisa didengar; hanya dengan sedikit perkecualian beberapa diantaranya berhasil mengukir diri mereka direlung-relung kemerdekaan.

Seperti halnya *Gemeenteraad*, *Volksraad* atau Dewan Rakyat juga merupakan produk menyambut desentralisasi dan politik etis. Sebagaimana dengan *Gemeenteraad* yang menuai banyak kecaman, begitupun dengan *Volksraad*. Selama hampir seluruh periode kehidupan *Volksraad*, mayoritas pemimpin penting nasionalis menolak bekerja lewat dewan tersebut. Bagi mereka *Volksraad* hanyalah “Kemidi Omong” yang tidak menghasilkan apa-apa jika dilihat dari apa yang dicita-citakan oleh tokoh-tokoh kooperatif yang bekerja di dalamnya (Leirissa, 1985, hlm. 79). Banyak pula yang meragukan kinerja *Volksraad* akan menguntungkan pihak Indonesia. Hal tersebut terjadi karena pada dasarnya *Volksraad* bukan merupakan suatu badan perwakilan dalam arti yang sebenarnya. *Volksraad* bukanlah dimaksudkan sebagai parlemen dengan tanggung jawab membuat undang-undang negara, melainkan sebagai suatu badan penasihat untuk Pemerintah Hindia Belanda (Komandoko, 2008, hlm. 118). Sebagaimana

yang diungkapkan oleh Hall (1988, hlm. 708) bahwa "...bukan merupakan suatu badan perwakilan dalam arti yang sebenarnya, mempunyai mayoritas orang-orang Eropah, dan kekuasaannya terbatas pada pengajuan nasehat, yang dapat tidak diterima oleh gubernur jenderal tanpa atarasi dari Den Haag". Tidak hanya itu, komposisi anggota *Volksraad* juga menjadi sumber kritik dan perasaan tidak puas. Sampai dengan tahun 1931 di dalam Dewan Rakyat terdapat mayoritas orang-orang Barat yang anggotanya bukan hasil pemilihan. Bahkan setelah jumlah anggotanya dibalik, Dewan Rakyat tetap tidak bersifat demokratis (Kartodirdjo, 1993, hlm. 46). Kahin (1995, hlm. 53) juga menambahkan bahwa:

Pada umumnya, keanggotaan *Volksraad* mencerminkan pandangan-pandangan suatu minoritas pergerakan kebangsaan, dan banyak dari anggotanya yang orang Indonesia terang-terang punya tujuan yang tidak lebih tinggi daripada sekedar mencapai pemerintahan sendiri secara terbatas yang akan dicapai pelan-pelan berdasarkan kerjasama dengan pemerintah Belanda.

Hal-hal tersebut membuat *Gemeenteraad* dan *Volksraad* semakin dicurigai oleh kebanyakan tokoh pergerakan terutama tokoh-tokoh non kooperatif sebagai badan perwakilan yang hanya akan memberikan keuntungan bagi pihak kolonial. Sutherland (1978, hlm. 190) menambahkan bahwa:

Kebanyakan anggota adalah pejabat dan hanya sedikit sekali pengaruh kaum radikal, suatu hal yang sungguh mengecewakan orang-orang Indonesia yang sadar politik. Mereka merasakan bahwa dewan-dewan yang semula banyak yang membangkitkan harapan yang meluap di tahun-tahun 1918 dan 1919, ternyata dalam praktek merupakan perluasan semata-mata dari birokrasi, dan lebih dari itu tak akan dipedulikan manakala terjadi perbedaan pandangan dengan pemerintah. Menurut seorang juru bicara Sarekat Islam, dewan-dewan itu ibarat gramafon; hanya diperdengarkan apabila yang diputar itu rekaman yang dikehendaki. Seorang kritikus menarik kesimpulannya, bahwa dewan-dewan itu adalah "semu semata-mata" atau "hanya berpura-pura" (dalam bahasa Jawanya *poera-poera raden*), suatu kesimpulan yang secara mengherankan dekat dengan komentar Simon de Graaff yang menyatakan bahwa dewan-dewan itu adalah sekedar produk Lembaran Berita Negara" (*Staatsblad maaksel*) -- sungguh merupakan suatu pernyataan tak terduga lantaran berasal dari arsitek utamanya sendiri.

Dari pernyataan di atas maka tidak mengherankan apabila banyak tokoh pergerakan yang kecewa dengan kinerja dewan-dewan tersebut yang jauh sekali

dari yang diharapkan. Mereka cenderung memandang bahwa pembentukan kekuatan di kalangan rakyat merupakan syarat mutlak untuk mengambil alih kekuasaan politik (Utomo, 1995, hlm. 80). Meskipun demikian, Mohammad Husni Thamrin tetap konsisten dengan jalur kooperatif yang ditempuhnya. Ia dengan gigih memperjuangkan kemerdekaan bangsa di dalam jalur resmi sebagai anggota badan perwakilan sampai ia menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 11 Januari 1941 sebagai tahanan rumah.

Kajian mengenai peranan Mohammad Husni Thamrin dalam Dewan Kota Batavia dan Dewan Rakyat merupakan kajian yang kontroversial di mana pada satu sisi Dewan Kota dan Dewan Rakyat merupakan badan perwakilan bentukan pemerintah kolonial yang mempunyai kewenangan terbatas dan terdiri dari mayoritas orang Eropa dan pejabat-pejabat pribumi, sehingga dewan-dewan tersebut dituding hanya akan mengutamakan kepentingan penguasa. Namun pada sisi lain, Dewan Kota dan Dewan Rakyat tersebut dijadikan Thamrin sebagai alat untuk mewujudkan ide-ide nasionalismenya. Sebagai tokoh kooperatif yang berjuang melalui kedua dewan tersebut, Thamrin bukannya menjadi antek-antek Belanda yang dengan proaktif memperjuangkan kepentingan pribadinya dan kepentingan Pemerintah Hindia Belanda, melainkan malah mempunyai banyak kontribusi dalam meningkatkan taraf hidup rakyat Indonesia dan memperjuangkan kemerdekaan bangsa.

Hal tersebut menjadi kajian yang menarik bagi peneliti karena kesediaan Thamrin untuk bekerjasama dengan Pemerintah Hindia Belanda menungkingkan Thamrin menjadi antek-antek Belanda yang setia patuh terhadap kekuasaan pemerintahan kolonial. Namun yang terjadi malah sebaliknya, Thamrin justru bersikap oposisi terhadap Pemerintah Hindia Belanda. Dewan Kota dan Dewan Rakyat yang dicurigai hanya akan memberikan keuntungan bagi pihak pemerintah kolonial digunakan Thamrin untuk memperjuangkan kepentingan rakyat Indonesia. Selain itu, sebagai tokoh kooperatif yang beroposisi terhadap pemerintahan kolonial, pergerakan Thamrin seharusnya dapat ditumpas dengan mudah oleh Pemerintah Hindia Belanda. Dengan perjuangan yang ia lakukan di dalam sistem pemerintahan seharusnya memudahkan bagi Pemerintah Hindia

Belanda untuk mengawasi dan menentukan sikap terhadap pergerakan yang dilakukan oleh Thamrin. Namun, meskipun bagi Pemerintah Hindia Belanda Thamrin merupakan politisi yang berbahaya, sebagaimana yang dikemukakan Hering (2003, hlm. vii-viii) bahwa “Gubernur Jendral Hindia-Belanda dengan gemas berpendapat bahwa orang paling berbahaya sebenarnya adalah Thamrin”, Thamrin tetap bisa memberikan kontribusinya terhadap bangsa ini dengan berjuang di jalur resmi sebagai anggota Dewan Kota Batavia dan Dewan Rakyat selama lebih dari dua dekade.

Berangkat dari permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai peranan Mohammad Husni Thamrin dalam *Gemeenteraad* dan *Volksraad* pada masa pergerakan nasional tahun 1919-1941 dan menyusunnya menjadi sebuah karya tulis ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul, “*Dari Gemeenteraad sampai Volksraad: Peranan Mohammad Husni Thamrin pada Masa Pergerakan Nasional (1919-1941)*”.

Adapun, alasan peneliti memilih tahun 1919 sebagai awal dari pembahasan karena pada tahun 1919 tepatnya pada tanggal 27 Oktober 1919, Mohammad Husni Thamrin diangkat oleh Walikota MR.G.J. Bisschop sebagai anggota *Gemeenteraad* atau Dewan Kota Batavia (Hering, 2003, hlm. 62). Sementara tahun 1941 dipilih sebagai akhir dari pembahasan karena pada tahun 1941 tepatnya pada tanggal 11 Januari 1941, perjuangan Mohammad Husni Thamrin baik di *Gemeenteraad* maupun *Volksraad* terpaksa harus berhenti. “Pada tanggal 11 Januari 1941, dalam status sebagai tahanan rumah yang telah berjalan 5 hari, keadaan fisik Mohammad Hoesni Thamrin tidak dapat tertolong lagi dan ia pun dipanggil dengan tenang pada pukul 04.00 dini hari menjelang subuh oleh Sang Pencipta” (Ruchiat, dkk. 2012, hlm. 4).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, rumusan masalah yang akan menjadi fokus utama penelitian ini adalah “*Bagaimana peranan Mohammad Husni Thamrin dalam Gemeenteraad dan Volksraad pada masa pergerakan nasional tahun 1919-1941?*” Untuk lebih mempermudah dan

mengarahkan dalam pembahasan, maka rumusan masalah di atas harus dibatasi dengan batasan-batasan masalah. Adapun batasan-batasan masalah tersebut dituangkan ke dalam beberapa pertanyaan penelitian, di antaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang kehidupan Mohammad Husni Thamrin?
2. Bagaimana peranan Mohammad Husni Thamrin dalam Dewan Kota (*Gemeenteraad*) Batavia?
3. Bagaimana peranan Mohammad Husni Thamrin dalam Dewan Rakyat (*Volksraad*)?
4. Bagaimana reaksi Pemerintah Hindia Belanda terhadap perjuangan Mohammad Husni Thamrin dalam *Gemeenteraad* dan *Volksraad*?
5. Bagaimana dampak perjuangan Mohammad Husni Thamrin dalam *Gemeenteraad* dan *Volksraad* terhadap perkembangan pergerakan nasional?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai peranan Mohammad Husni Thamrin dalam *Gemeenteraad* dan *Volksraad* pada masa pergerakan nasional tahun 1919-1941. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan jawaban-jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah diajukan, di antaranya sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan latar belakang kehidupan Mohammad Husni Thamrin.
2. Mendeskripsikan peranan Mohammad Husni Thamrin dalam Dewan Kota (*Gemeenteraad*) Batavia.
3. Mendeskripsikan peranan Mohammad Husni Thamrin dalam Dewan Rakyat (*Volksraad*).
4. Menganalisis reaksi Pemerintah Hindia Belanda terhadap perjuangan Mohammad Husni Thamrin dalam *Gemeenteraad* dan *Volksraad*.
5. Menganalisis dampak perjuangan Mohammad Husni Thamrin dalam *Gemeenteraad* dan *Volksraad* terhadap perkembangan pergerakan nasional.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan peneliti setelah adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini dapat mengasah kemampuan peneliti dalam menyusun suatu karya tulis ilmiah melalui sebuah penelitian dengan mengaplikasikan teori-teori yang didapat selama perkuliahan.
2. Penelitian ini dapat memperkaya tulisan yang berkaitan dengan tokoh sejarah nasional yang berperan pada masa pergerakan nasional.
3. Penelitian ini dapat memperkaya pemahaman mengenai salah satu tokoh pergerakan nasional yang berjuang dengan cara kooperatif.
4. Penelitian ini mampu memberikan kontribusi bagi khasanah ilmu pengetahuan serta dapat dijadikan sumber bacaan dan sumber rujukan bagi para pelajar yang membacanya.

1.5 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode historis atau metode sejarah yang lazim digunakan dalam penelitian sejarah. Ismaun (2005, hlm. 34) mengemukakan bahwa “Metode sejarah ialah rekonstruksi imajinatif tentang gambaran masa lampau peristiwa-peristiwa sejarah secara kritis dan analitis berdasarkan bukti-bukti dan data peninggalan masa lampau yang disebut sumber sejarah”. Dalam hal ini berkaitan dengan langkah-langkah yang digunakan dalam melakukan penelitian sejarah, Herlina (2011, hlm. 15-16) membagi langkah-langkah dalam metode sejarah tersebut ke dalam empat tahapan yaitu:

- 1 Heuristik, yaitu tahapan/kegiatan menemukan dan menghimpun sumber, informasi, dan jejak masa lampau.
- 2 Kritik, yaitu tahapan/kegiatan meneliti sumber, informasi, dan jejak tersebut secara kritis, yang terdiri atas kritik eksternal dan kritik internal.
- 3 Interpretasi, yaitu tahapan/kegiatan menafsirkan fakta-fakta serta menetapkan makna dan saling hubungan daripada fakta-fakta yang diperoleh.
- 4 Historiografi, yaitu tahapan/kegiatan menyampaikan hasil-hasil rekonstruksi imajinatif masa lampau itu sesuai dengan jejak-jejaknya.

Senada dengan Herlina, Ismaun (2005, hlm. 48-51) mengemukakan bahwa metode penelitian sejarah mencakup empat kegiatan yang terdiri dari heuristik yaitu pencarian dan pengumpulan sumber sejarah yang relevan, kritik sumber yang terdiri dari kritik eksternal dan kritik internal, interpretasi atau penafsiran terhadap makna fakta-fakta sejarah, dan historiografi atau penulisan sejarah.

Sebagai langkah awal dalam melakukan penelitian, peneliti melakukan proses heuristik. Heuristik merupakan upaya mencari dan mengumpulkan sumber-sumber yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Pada tahap ini, peneliti mencari dan mengumpulkan sumber tertulis yang berhubungan dengan peranan Mohammad Husni Thamrin dalam *Gemeenteraad* dan *Volksraad* pada masa pergerakan nasional tahun 1919-1941 baik berupa buku, artikel ilmiah, skripsi, disertasi, maupun artikel internet yang relevan dengan permasalahan yang dikaji.

Setelah proses heuristik, tahap kedua yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kritik. Kritik yaitu upaya menyaring secara kritis terhadap sumber-sumber yang telah ditemukan agar dapat terjaring fakta-fakta terkait dengan permasalahan yang dikaji. Tahap kritik terdiri dari kritik ekstern dan kritik intern. Kritik ekstern dilakukan untuk melihat otensitas dan integritas dari sumber yang didapatkan, sebagaimana yang dikemukakan Sjamsuddin (2007, hlm. 133) bahwa, “Adalah fungsi dari kritik eksternal memeriksa sumber sejarah atas dasar dua butir pertama dan menegakkan sedapat mungkin otensitas dan integritas dari sumber itu”. Sedangkan kritik internal dilakukan untuk melihat kredibilitas sumber dengan menilai layak tidaknya isi atau substansi materi dari sumber-sumber yang telah diperoleh tersebut untuk selanjutnya dijadikan bahan penelitian dan penulisan skripsi ini.

Selanjutnya, tahap ketiga yang dilakukan dalam penelitian ini adalah interpretasi. Interpretasi yaitu penafsiran dan pengelompokkan fakta-fakta dari berbagai sumber yang ditemukan yang telah melewati tahap kritik. Dalam tahap ini, permasalahan penelitian mulai dipecahkan dengan jalan menafsirkan fakta-fakta sejarah yang telah diseleksi dan disaring pada tahapan kritik. Fakta-fakta yang telah diseleksi dan ditafsirkan tersebut selanjutnya dijadikan pokok pikiran sebagai kerangka dasar dalam penulisan skripsi ini.

Tahap terakhir yang dilakukan dalam penelitian ini adalah historiografi. Historiografi adalah usaha mensintesiskan peristiwa-peristiwa sejarah yang digambarkan melalui penafsiran terhadap fakta-fakta sejarah yang telah didapat melalui proses interpretasi (Ismaun, 2005, hlm. 55-56). Dalam tahap ini, penulis menyajikan hasil temuannya yang telah melewati tiga tahapan sebelumnya yaitu heuristik, kritik, dan interpretasi yang kemudian dituangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul, "*Dari Gemeenteraad sampai Volksraad: Peranan Mohammad Husni Thamrin pada Masa Pergerakan Nasional (1919-1941)*".

1.6 Struktur Organisasi Skripsi

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dari penyusunan penulisan ini, berikut peneliti cantumkan struktur organisasi skripsi yang terbagi ke dalam lima bab, yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini dijelaskan latar belakang penelitian yang menjadi alasan peneliti sehingga merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang peranan Mohammad Husni Thamrin dalam *Gemeenteraad* dan *Volksraad* pada masa pergerakan nasional tahun 1919-1941. Selain itu, bab ini pun memuat rumusan dan batasan masalah agar pembahasan terfokus dan tidak melebar. Bab ini pun memuat tujuan, manfaat serta metode penelitian. Terakhir dalam bab ini diuraikan struktur organisasi skripsi yang digunakan sebagai kerangka dan pedoman dalam penyusunan skripsi.

Bab II Kajian Pustaka dan Landasan Teoretis, dalam bab ini dipaparkan sejumlah karya tulis ataupun literatur lainnya yang digunakan sebagai acuan dan dipergunakan oleh peneliti dalam menelaah dan mengkaji tentang peranan Mohammad Husni Thamrin dalam *Gemeenteraad* dan *Volksraad* pada masa pergerakan nasional tahun 1919-1941. Bab ini juga memaparkan konsep-konsep yang digunakan serta tinjauan teoretis yang menunjang penelitian yang peneliti lakukan.

Bab III Metode Penelitian, dalam bab ini diuraikan metode atau langkah-langkah yang ditempuh oleh peneliti dalam mencari sumber-sumber, cara

pengolahan sumber, analisis dan cara penulisannya. Adapun metode yang digunakan adalah metode historis yang lazim digunakan dalam penelitian sejarah. Dalam bab ini juga diuraikan langkah-langkah penelitian yang dilakukan peneliti antara lain yaitu tahap persiapan penelitian, tahap pelaksanaan penelitian, dan tahap penulisan penelitian.

Bab IV Peranan Mohammad Husni Thamrin dalam *Gemeenteraad* dan *Volksraad* pada Masa Pergerakan Nasional Tahun 1919-1941, dalam bab ini diuraikan seluruh hasil dari kegiatan penelitian. Uraian tersebut disesuaikan dengan permasalahan serta pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan pada bab pertama. Uraian tersebut oleh peneliti dikelompokkan ke dalam beberapa sub bab. Pertama, mengenai latar belakang kehidupan Mohammad Husni Thamrin. Kedua, mengenai peranan Mohammad Husni Thamrin dalam Dewan Kota (*Gemeenteraad*) Batavia. Ketiga, mengenai peranan Mohammad Husni Thamrin dalam Dewan Rakyat (*Volksraad*). Keempat, mengenai reaksi Pemerintah Hindia Belanda terhadap perjuangan Mohammad Husni Thamrin dalam *Gemeenteraad* dan *Volksraad*. Kelima sebagai sub bab terakhir yaitu mengenai dampak perjuangan Mohammad Husni Thamrin dalam *Gemeenteraad* dan *Volksraad* terhadap perkembangan pergerakan nasional.

Bab V Simpulan dan Saran, dalam bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban secara umum dari permasalahan yang dikaji. Selain itu bab terakhir ini juga memaparkan saran-saran yang bermanfaat bagi beberapa pihak yang berhubungan baik langsung maupun tidak langsung dengan penulisan skripsi ini.